

### Format Usulan Program RAN OGI VII 2023-2024

<b>Negara</b>	INDONESIA		
<b>Nomor dan Nama Komitmen</b>	# .... Akuntabilitas New DTKS yang Inklusif		
<b>Deskripsi Singkat Komitmen</b>	<p>Konstitusi dan Dasar Negara menjamin perlindungan sosial melalui pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat dan juga pada Pasal 28H ayat (1) serta Sila kelima Pancasila. Bentuk komitmennya melalui regulasi: UU 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Pasal 8 – 11, khusus terkait tentang perbaikan data, pengelolaan dan penetapannya); UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (berkaitan dengan kewenangan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin secara berjenjang); dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024;</p> <p>Untuk mewujudkan itu, perlu ada integrasi data penerima manfaat. Sementara, data penerima manfaat program kesejahteraan sosial belum sepenuhnya terintegrasi dan belum inklusif, sehingga mengurangi ketepatan sasaran dan efektifitas program. Sesuai dengan RAN OGI sejak 2018 – 2022, data ini bisa diakses oleh publik dengan mengakses melalui NIK untuk “kroscek warga”.</p> <p>Masalahnya, hingga saat ini kelompok rentan (lansia, perempuan, masyarakat adat, difable, minoritas agama, LBGTQI+) sulit masuk dalam DTKS dan masih banyak terjadi <i>inclusion error</i> dan <i>exclusion error</i> dalam DTKS. Sehingga dibutuhkan suatu sistem akuntabilitas New DTKS yang memastikan partisipasi aktif warga termasuk kelompok rentan tersebut dapat terlibat aktif dan mampu memberikan masukan data secara mudah dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>		
<b>Pengusul Komitmen</b>	Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Medialink)		
<b>Pemangku Kepentingan</b>	<b>Kementerian/ Lembaga (K/L)</b>	<b>Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)</b>	<b>Aktor Lainnya (Parlemen, Sektor Privat, dll)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Sosial (Biro Perencanaan dan Pusdatin).</li> <li>- Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Admindak)</li> </ul>	Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Program Kesejahteraan Sosial	
<b>Jangka</b>	24 Bulan		

Waktu	
-------	--

**Identifikasi Masalah**

**1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?**

Masalah yang ingin diselesaikan adalah kelompok rentan (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) seperti lansia, perempuan, masyarakat adat, difable, minoritas agama, LBGTQI+. Mereka belum dapat mengakses informasi DTKS secara mudah, sehingga tidak mendapatkan jaminan kepastian dalam perlindungan sosial karena tidak dapat memberikan masukan. Hal ini terjadi dari seluruh daerah di Indonesia, karena kelompok PMKS ini secara umum tidak mudah mendapatkan identitas kependudukan yang menjadi prasyarat masuk dalam DTKS dan mereka tidak dapat mengakses informasi sebagaimana yang disediakan oleh pemerintah dalam bentuk sistem yang hanya bisa diakses oleh warga yang non PMKS.

Hal ini berdampak terhadap program-program kesejahteraan pemerintah yang tidak dapat mereka nikmati, karena tidak tercatat dalam dalam DTKS, mengingat rujukan program ini harus mengacu kepada DTKS. Masalah ini sudah sangat lama dihadapi oleh warga rentan. Terutama pada saat pandemi, merekalah kelompok yang sangat terdampak dan tidak mendapatkan akses bantuan apapun dari pemerintah.

**2. Apa penyebab permasalahan tersebut?**

Masalah ini terjadi disebabkan karena dua hal: Pertama, kelompok rentan belum mendapatkan akses secara mudah untuk perekaman administrasi kependudukan yaitu KTP elektronik. Penyebab kedua, mereka tidak mendapatkan akses secara mudah terkait informasi DTKS serta akses untuk memberikan masukan DTKS. Mekanisme "USUL-SANGGAH" yang sudah dibuat oleh pemerintah melalui [cekbansos.kemensos.go.id](http://cekbansos.kemensos.go.id) atau aplikasi cek bansos yang berbasis android hanya dapat diakses oleh warga yang non difable.

Hal ini berdampak pada tertutupnya kelompok rentan untuk mendapatkan program-program kesejahteraan sosial yang meliputi perlindungan sosial seperti BPNT, PKH, BST maupun program-program kesejahteraan lainnya. DTKS menjadi rujukan dalam penetapan penerima program-program kesejahteraan sosial yang berbasis NIK yang sudah online. Sementara, kelompok rentan ini masih banyak yang sulit untuk memiliki NIK.

Terhadap mekanisme "USUL-SANGGAH" dengan disediakan oleh Pemerintah seperti di atas, hanya bisa diakses oleh warga non difable. Ini menyebabkan kelompok rentan tidak dapat mendapatkan informasi DTKS dan tidak dapat berpartisipasi untuk memberikan usulan dan sanggahan terkait data-data yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Menurut hasil riset yang dilakukan secara bersama oleh Masyarakat Sipil melalui program Mpowering Access to Justice (MAJu), telah menyelesaikan suatu kajian tentang Akses Perlindungan Sosial Peserta Penjangkauan di Jabodetabek, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hasil kajian yang diolah berdasarkan data lapangan menemukan sejumlah fakta-fakta menarik proses distribusi bansos bagi kelompok rentan dan termarginalkan, beberapa diantaranya adalah terdapat *exclusion error* 26% peserta program yang tidak menerima Bansos dengan beragam alasan, seperti tidak memiliki KTP, bukan warga yang menetap, dan lainnya.

## Deskripsi Komitmen

### 1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

- Pada RAN OGI 2018-2020 telah dijalankan komitmen terkait Akuntabilitas Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang ditanggung APBN dengan menggunakan sistem yang disiapkan oleh Kementerian Sosial yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG).
- Pada Renaksi OGI 2020-2022 dikembangkan menjadi komitmen Integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk akuntabilitas Program-program Kesejahteraan.
- Menjadi salah satu fokus dalam Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2021-2022, khusus berkaitan dengan pepadanan DTKS dengan NIK dan mengintegrasikan dengan seluruh data-data untuk program-program kesejahteraan sosial.

Hasilnya saat ini, baru melakukan pembersihan dulu dalam DTKS sehingga tidak tumpang tindih, tidak double, membersihkan data-data bagi warga yang sudah meninggal dan memastikan data yang tercatat dalam DTKS harus NIK nya online (aktif). Untuk rencana pengembangannya dengan memaksimalkan publik untuk melakukan kroscek secara mandiri melalui aplikasi [cekbansos.kemensos.go.id](http://cekbansos.kemensos.go.id) dengan harapan dapat melakukan "USUL-SANGGAH". Namun demikian, USUL-SANGGAH baru dijalankan pada pertengahan tahun 2022, sehingga belum banyak mendapatkan hasil. Terlebih, platform yang digunakan dengan menggunakan internet yang relatif tidak dapat diakses secara mudah oleh kelompok rentan. Begitu juga dengan bagi kelompok rentan yang masih sulit mendapatkan e-KTP.

### 2. Solusi apa yang diusulkan?

Komitmen ini mencakup pendataan yang akuntabel dengan memastikan kelompok rentan harus masuk dalam New DTKS melalui transparansi dan partisipasi aktif dari seluruh tingkatan. Partisipasi dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui kelompok pendamping.

Hal pertama yang dilakukan adalah dengan mengembangkan aplikasi [cekbansos.kemensos.go.id](http://cekbansos.kemensos.go.id) dapat diakses secara mudah oleh kelompok rentan, platformnya accessible bagi kelompok rentan.

Kedua adalah untuk memastikan kelompok difable masuk dalam DTKS dengan memberikan ruang bagi kelompok rentan dengan melibatkan partisipasi kelompok rentan tersebut dalam aplikasi USUL-SANGGAH dengan mekanisme verifikasi yang dibuat secara khusus (dibedakan dengan verifikasi pada USUL-SANGGAH yang dibedakan dengan verifikasi dan validasi pada kelompok non difable).

Jika hal ini dilakukan, paling tidak kelompok rentan dapat mengakses informasi DTKS, informasi mekanisme pengusulan dan sanggahan yang dapat dilakukan baik secara mandiri oleh warga rentan maupun melalui komunitasnya masing-masing.

Pengembangan aplikasi ini akan berhasil jika didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini yang membidangi Administrasi Kependudukan untuk memastikan komunitas rentan ini tercatat dan aktif dalam KTP elektronik. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Otonomi Daerah juga harus bersama-sama mendorong kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan implementasi verifikasi dan validasi USUL-SANGGAH melalui aplikasi [cekbansos.kemensos.go.id](http://cekbansos.kemensos.go.id) yang sudah dikembangkan sebelumnya.

**3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?**

Kelompok rentan atau PMKS/PPKS khususnya bagi lansia, perempuan, masyarakat adat, difable, minoritas agama dan LBGTQI+ mendapatkan jaminan perlindungan sosial melalui program-program kesejahteraan sosial karena masuk dalam New Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (New DTKS). Ini sebagai perwujudan dalam menjalankan konstitusi yaitu hak warga atas jaminan sosial dan sangat relevan dengan moto SDGs yaitu “No One Left Behind”. Hasil lainnya yang ingin dicapai adalah pemerintah memiliki data yang akurat terkait Kesejahteraan Sosial, memiliki sistem USUL-SANGGAH yang dapat menjangkau seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Sehingga akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial dapat terwujud.

Analisa Komitmen	
Pertanyaan	Jawaban (jika tidak berlaku, isi dengan N/A)
1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?	Dengan pengembangan sistem pada aplikasi cekbansos.kemensos.go.id yang memberikan ruang akses mudah bagi kelompok rentan, maka kelompok rentan akan mendapatkan informasi secara baik tentang data kesejahteraan. Pemerintah akan dinilai sangat terbuka berkaitan dengan data kesejahteraan warga, tidak hanya bagi warga non difable tetapi juga menjangkau warga rentan (difable).
2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?	Pengembangan sistem yang memungkinkan warga dapat mengakses secara mudah informasi data kesejahteraan akan menjadikan data tersebut lebih akurat dan berdampak pada ketepatan sasaran seperti yang menjadi mimpi pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 yaitu terwujudnya efektifitas program kesejahteraan sosial yang diukur melalui 5 T )Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi).
3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?	Dengan pengembangan aplikasi cekbansos.kemensos.go.id akan berdampak partisipasi warga meningkat termasuk menjangkau kelompok rentan, serta mekanisme USUL-SANGGAH yang inklusif akan memberikan stimulus kepada seluruh warga untuk berpartisipasi terhadap akuntabilitas data kesejahteraan sosial yang ada.

Perencanaan Komitmen									
<i>(Ini proses perencanaan awal yang melihat ukuran keberhasilan dan output yang diharapkan, serta pemangku kepentingan utama yang terlibat.)</i>									
Ukuran Keberhasilan	Output yang Diharapkan	Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan	Pemangku Kepentingan						
Pengembangan desain aplikasi New DTKS (USUL-SANGGAH) yang memastikan kelompok rentan berpartisipasi aktif	- Dokumen Kajian Bersama OMS dan Kemensos efektifitas aplikasi New DTKS – CEK BANSOS	Januari 2023 – Maret 2023	Penanggungjawab Utama: Kemensos dan Medialink						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pemangku Kepentingan Pendukung</th> </tr> <tr> <th>K/L</th> <th>OMS</th> <th>Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Pemangku Kepentingan Pendukung			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
Pemangku Kepentingan Pendukung									
K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)							

			Kemenkomi nfo, Kemendagri	Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Anggaran Program Kesejahter aan	
	- Kesepakatan antara kemensos dan masyarakat sipil terkait pengembangan desain aplikasi New DTKS (USUL- SANGGAH) yang memastikan kelompok rentan berpartisipasi aktif.	April 2023 – Juni 2023	Penanggungjawab Utama: Kemensos dan Medialink		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
			Kemenkomi nfo, Kemendagri	Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Anggaran Program Kesejahter aan	
	Desain final aplikasi New DTKS (USUL- SANGGAH) yang memastikan kelompok rentan berpartisipasi aktif	Juli 2023 – Agustus 2023	Penanggungjawab Utama: Kemensos		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
			Kemenkomi nfo, Kemendagri	Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Anggaran Program Kesejahter aan	
Adanya peningkatan pemahaman publik terhadap aplikasi New DTKS dan peningkatan partisipasi warga untuk mengakses (khususnya kelompok rentan)	- Terlaksananya sosialisasi bersama pemanfaatan aplikasi New DTKS - Publik, khususnya kelompok rentan berpartisipasi aktif mengakses New DTKS yang telah dikembangkan	Oktober 2023 – Desember 2023	Penanggungjawab Utama: Kemensos dan Medialink		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
			Kemenkomi nfo, Kemendagri	Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Anggaran Program Kesejahter aan	
Kemensos memiliki data kesejahteraan yang akuntable dan inklusif	Pemanfaatan aplikasi New DTKS (USUL- SANGGAH) sebagai acuan dalam penetapan DTKS untuk seluruh program-program Kesejahteraan Sosial	Januari 2024 – Desember 2024	Penanggungjawab Utama: Kemensos		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
			Kemenkomi nfo, Kemendagri	Medialink, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Anggaran Program Kesejahter aan	